

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 27 Juli. Surat Edaran Nomor SE-18/PJ/2006. Tentang *Key Performance Indicator*.

Halim, Abdul dkk. 2016. *Perpajakan edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326> (Yang diakses tanggal 20 April 2019)

Lainutu, Amina. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado*. Ekonomi Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Olivia dan Didik. 2017. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Per 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 serta Bentuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/Atau Pasal 26 serta Bentuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26*. Jakarta.

Pohan, Erlina Sari. 2018. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon*. Program Studi Akuntansi. STIE Al-Kharyiah Cilegon.

- Putra, Anggun Bina. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukaharjo*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Ramadini, Hesti Purnama. 2011. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bina Darma
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiraada, Triyana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WP OP di Kabupaten Minahasa Selatan. /Jurnal EMBA, 1(3). Hal.999-1008.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara
- Yusran, Rio Rahmat. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemotongan PPh Pasal 23*. Fakultas Ekonomi. Universitas Putera Batam.